

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan dan Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi Oleh PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam

Muhamad All Aziz¹, Fitri Eriyanti²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: Azizcavaliers09@gmail.com, fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan serta program pengembangan kehidupan berkoperasi oleh PKK dalam pemberdayaan masyarakat. Teori yang digunakan oleh Charles O. Jones yaitu pilar aktivitas dalam pelaksanaan program. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan serta program pengembangan kehidupan berkoperasi masih belum optimal. Kendala yang ditemukan oleh PKK yaitu rendahnya mutu SDM, kurang jelasnya aturan dan sanksi, serta rendahnya kesadaran masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi sedikit.

Kata kunci: *Pelaksanaan Program, Pemberdayaan, Program PKK*

Abstract

This study aims to determine the implementation of educational programs and skills as well as the development of life programs operated by the PKK in community empowerment. The theory used by Charles O. Jones is the pillar of activity in program implementation. The method used is descriptive method with a qualitative approach and the technique of selecting purposive sampling of informants. Data collection is done by observation, interview and documentation study. The results of this study show that the implementation of educational and outreach programs and cooperative life development programs are still not optimal. Constraints found by the PKK are the low quality of human resources, lack of clarity of rules and sanctions, as well as low public awareness so that community participation is minimal.

Keywords: *Program Implementation, Empowerment, Programs*



Received: January 15, 2019

Revised: January 28, 2020

Available Online: January 30, 2020

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya guna meningkatkan potensi masyarakat agar dapat mandiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam menghadapi masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat (Indrika, 2013). Oleh sebab itu, pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan memerlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena pada dasarnya, rata-rata penduduk Indonesia kebanyakan dari daerah pedesaan. Maka dari itu, pemerintah memerlukan program yang dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Program menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat yang dikeluarkan melalui suatu kebijakan pemerintah. Pelaksanaan dari program oleh pemerintah diberikan kepada lembaga-lembaga atau organisasi yang berteman dengan pemerintah untuk melaksanakan program pemberdayaan ini. Pelaksanaan program itu sendiri memiliki tiga pilar dalam pengoperasikannya yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (Kurniadi, 2012) yaitu : 1) Pengorganisasian yaitu sesuatu organisasi yang jelas diperlukan dalam pelaksanaan program sehingga para tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. 2) Interpretasi yaitu para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk pelaksana dan mampu memahami program itu sendiri agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 3) Penerapan dan Aplikasi yaitu dalam pelaksanaannya perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar dapat berjalan sesuai jadwal serta tidak berbenturan dengan program lainnya dan dapat terlaksanakan dengan baik.

PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang menggerakkan masyarakat desa dalam pembangunan serta berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa. PKK merupakan sebuah organisasi yang bekerjasama dengan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No 99 Tahun 2017 tentang gerakan PKK disebutkan bahwa gerakan PKK merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, oleh, dan untuk masyarakat, demi mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan (Perpres, 2017).

Dalam menciptakan tujuan tersebut, PKK memiliki 10 program pokok yang telah dituliskan dalam Peraturan Presiden no 99 tahun 2017 (Perpres, 2017). Adapun 10 program pokok PKK tersebut dibagi menjadi empat kelompok kerja atau disebut Pokja yang mengatur dan melaksanakan kegiatan dari programnya masing-masing. Pokja I bergerak pada program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan program gotong royong, Pokja II bergerak pada program Pendidikan dan keterampilan serta program pengembangan kehidupan berkoperasi, Pokja III bergerak pada program pangan, sandang dan program perumahan dan tata laksana, Pokja IV bergerak pada program kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat. Penulis tertarik dan mencoba untuk meneliti pelaksanaan program yang digerakkan oleh Pokja II PKK yaitu program pendidikan dan keterampilan serta program pengembangan kehidupan berkoperasi.

Nagari Canduang Koto Laweh merupakan salah satu nagari di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang juga bekerjasama dengan PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. PKK nagari Canduang Koto Laweh sudah melaksanakan program pendidikan dan keterampilan serta program pengembangan kehidupan berkoperasi. Namun

dalam pelaksanaannya masih terbelang melum maksimal. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan sekretaris PKK nagari Canduang Koto Laweh menyebutkan bahwa adanya terdapat kendala-kendala yang ditemui oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya yaitu SDM atau para anggotak PKK yang kurang memiliki mutu dalam menggerakkan, membimbing dan membina masyarakat. Selain itu juga terdapat para anggota yang kurang disiplin dan dikarenakan aturan dan sanksi yang tidak jelas membuat mereka tidak menjadi jera. Serta rendahnya rasa kesadaran masyarakat nagari Canduang Koto Laweh untuk ikut berpartisipasi bersama kegiatan program PKK membuat pelaksanaan program PKK ini di Canduang Koto Laweh masih belum berjalan dengan baik.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh untuk mengatasi kendala yang ditemukan tersebut diantaranya yaitu memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan terhadap anggota PKK nagari Canduang Koto Laweh guna meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaan mereka. Selain itu PKK juga memberikan arahan dan teguran serta peringatan terhadap anggota PKK yang kurang disiplin sehingga mereka dapat mengintropeksi diri dan diharapkan terdapat efek jera kepada anggota PKK tersebut. Serta PKK meningkatkan pemberian sosialisasi berupa pertemua-pertemuan untuk meningkatkan rasa kesadaran masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi dari masyarakat nagari Canduang Koto Laweh dalam ikut menyelenggarakan kegiatan dari program PKK.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposive sampling. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Keterampilan

Pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan telah diungkapkan dalam 10 program pokok PKK dalam Peraturan Presiden No. 99 tahun 2017 yang merupakan tanggung jawab Pokja II PKK dimana pelaksanaannya sangat penting bagi kepentingan masyarakat demi kesejahteraannya. Sesuai dengan dimensi yang dijadikan alat ukur dalam pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto yang mana salah satu dari tiga poinnya yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan (Suharto, 2005). Program ini juga sesuai dengan poin pertama dari tujuan pemberdayaan menurut Totok yaitu perbaikan Pendidikan (Totok Mardikanto, 2012).

Peneliti juga menemukan pelatihan kerampilan yang telah diberikan oleh PKK Canduang Koto Laweh yaitu menjahit, merangkai bunga, dan membuat tas dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai sehingga masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya dengan memanfaatkan pelatihan tersebut. Hal ini relevan dengan tujuan dari pelatihan itu sendiri menurut Oemar Hamalik mengatakan bahwa adapun yang diharapkan dari pelatihan, yaitu: Peningkatan

semangat kerja, Pembinaan budi pekerti. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan kecerdasan, Meningkatkan keterampilan, Meningkatkan derajat kesehatan serta kesejahteraan, Meningkatkan taraf hidup, Memeratakan pembangunan dan pendapatan (Reguning, 2012). Dari beberapa poinnya, terdapat bahwa tujuan pelatihan diharapkan meningkatkan keterampilan, kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, yang mana sesuai dengan maksud dari tujuan PKK yang telah memberikan pelatihan keterampilan tersebut kepada masyarakat Canduang Koto Laweh.

Pelaksanaan Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Hasil dari temuan peneliti, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) membina ibu-ibu dalam pembuatan kue dari bahan dasar tanaman perkarangan rumah seperti ubi batang, pandan, dan sebagainya. Ibu-ibu ini berkelompok mengerjakan kue tersebut dari pengumpulan modal bersama hingga pemasaran yang mana hasilnya dibagi bersama. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hendar, bahwa koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis (Sari, 2017). Temuan ini juga sesuai dengan fungsi serta peran pada koperasi Indonesia dalam UU Perkoperasian Bab 1 pasal 1 tahun 2012 yaitu: alat mengembangkan dan membangun potensi ekonomi, memperkuat perekonomian, mempromosikan kehidupan, mewujudkan perekonomian nasional.

Kendala yang ditemui PKK dalam Pelaksanaan Program pendidikan dan Keterampilan dan Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh.

Sumberdaya manusia yang kurang berkompeten.

Dari hasil temuan peneliti tampak bahwa anggota PKK banyak yang melalaikan tugasnya. Dari berbagai alasan yang disampaikan oleh mereka yaitu karena sibuk, kurangnya motivasi dan ada karena malas mengikuti kegiatan tersebut. Sistem perekrutan PKK tidak efektif dalam menciptakan sumberdaya yang berkompeten dikarenakan prinsip kesukarelaan PKK dimana dalam penerimaan anggotanya tidak melalui seleksi yang jelas namun hanya dengan rasa kesadaran sosial mereka saja. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh George C. Edwards III bahwa yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan kebijakan salah satunya yaitu sumberdaya dimana didalamnya termasuk sumberdaya manusia (Subarsono, 2005).

Sanksi dan aturan yang kurang jelas

Pada temuan peneliti, aturan dan sanksi dalam mengupayakan kedisiplinan anggota PKK masih tidak jelas. Adapun terdapat yang mempengaruhi disiplin dalam suatu organisasi diantaranya yaitu keadilan, sanksi dan hukuman, teladan pemimpin, kemampuan tujuan. Adanya para pelaksana program PKK yang melalaikan tugasnya dikarenakan kurangnya motivasi dan juga menyebabkan mereka menjadi malas. Kurang disiplin dari anggota PKK tersebut juga karena tidak adanya ketegasan dalam PKK Canduang Koto Laweh yang menyebabkan rendahnya tingkat kualitas anggota pelaksana. Sebab pada temuan peneliti, aturan dalam menegakkan kedisiplinan anggota PKK di Canduang Koto Laweh belum ada. Sanksi yang diberikan bagi anggota PKK yang tidak disiplin saat ini hanya berupa teguran dan pengarahan peningkatan kesadaran akan norma sosial didalam diri anggota PKK.

Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat

Masyarakat merupakan aktor dalam pemberdayaan seperti yang diungkapkan oleh Ony bahwa partisipasi masyarakat yang merupakan aktor utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat membuat tujuan dari PKK guna mensejahterakan masyarakat menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kesadaran dan respon dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program yang sudah tersusun, sehingga kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan program PKK masih kurang, seperti sebagian kecil masyarakat Canduang Koto Laweh masih acuh tak acuh dan tidak terlalu menanggapi dengan adanya program PKK yang diselenggarakan oleh PKK.

Sarana yang masih belum memadai.

Berdasarkan temuan peneliti, yang dimaksud yaitu modal, fasilitas, alat-alat menjadikan pelaksananya tidak efektif. Dalam pelatihan keterampilan tidak semua masyarakat yang mengikuti kegiatan menjahit mendapatkan mesin jahit untuk mempraktikkannya. Modal guna menambah mesin jahit juga menjadi kendala bagi PKK. Tidak hanya itu, masyarakat yang ingin meningkatkan pendapatan mereka dengan membuka tempat menjahit juga terkendala oleh modal. Temuan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh George C. Edwards III bahwa sumberdaya ialah salah satu yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan kebijakan (Subarsono, 2005).

Solusi yang Dapat Dilakukan oleh PKK untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi PKK Nagari Canduang Koto Laweh dalam Pelaksanaan Program Pendidikan dan Keterampilan dan Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan bahwa solusi yang telah dilakukan oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh dalam mengatasi kendala yang ditemukan diantaranya:

Memberikan pelatihan bagi anggota PKK

Berdasarkan temuan peneliti, PKK nagari Canduang Koto Laweh memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan yang telah dilakukan yaitu pendidikan, pembinaan dan peningkatan keterampilan kerajinan, memasak kue dan kudapan sehingga anggota PKK juga mampu untuk membimbing masyarakat. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Friedman dan Yarbrough menyampaikan pelatihan adalah upaya pembelajaran, diselenggarakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan organisasi (Dytta Fazrina P. S., 2016). Juga sesuai dengan Goldstein dan Gressner dalam mengartikan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, yang berdampak pada kualitas kinerja (Dytta Fazrina P. S., 2016).

Penegasan sanksi berupa pengarah dan teguran

Tidak adanya kejelasan sanksi dan peraturan bagi anggota PKK yang malas atau melalaikan tugasnya, PKK Canduang mengupayakan dengan memberikan berupa pengarah dan teguran yang diharapkan para aktor pelaksana tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Temuan penulis juga sesuai konsep yang disebutkan oleh Sulistyastuti dalam kelancaran implementasi kebijakan bahwa komitmen baru akan berkontribusi guna menghasilkan output kerja yang maksimal ketika personil memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjalankan tugas yang didelegasikan dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah (Sulistyastuti, 2012).

Mensosialisasikan program PKK melalui penyuluhan

Berdasarkan temuan peneliti, PKK sudah melakukan usaha untuk mensosialisasikan program PKK melalui acara penyuluhan guna berkomunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka tentang manfaat dan tujuan PKK untuk bekerja sama dengan masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hasil ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh George C. Edwards III bahwa salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi (Subarsono, 2005). PKK mengkomunikasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan yang diselenggarakan agar mereka paham tentang program PKK sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini diantaranya yaitu Pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan dan program pengembangan kehidupan berkoperasi oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh masih belum terselenggara dengan baik. Selanjutnya terdapat sejumlah kendala yang ditemui oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh dalam pelaksanaan programnya yaitu lemahnya SDM di dalam PKK, kurangnya motivasi anggota PKK dalam pelaksanaan program, kurangnya sanksi dan aturan yang diberikan kepada anggota PKK yang tidak melaksanakan tugasnya. Dari masyarakat masih lemahnya kesadaran mereka, partisipasi dari masyarakat masih kurang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana masih belum mencukupi bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan bersama PKK. Dalam menghadapi kendala yang ditemui, adapun upaya yang dilakukan oleh PKK nagari Canduang Koto Laweh yaitu dengan mensosialisasikan program PKK melalui acara-acara seperti penyuluhan, seminar dan lomba-lomba PKK. Memberikan sanksi berupa teguran dan arahan bagi anggota PKK yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya, dan memberikan pelatihan kepada anggota PKK guna meningkatkan kualitas SDM.

Daftar Pustaka

- Dytta Fazrina P. S. (2016). *Pemanfaatan Hasil Belajar pada Pelatihan Keterampilan Mekanik Otomotif Universitas. 1984*, 7–41.
- Indrika, R. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tanjung dalam Meningkatkan Kualitas Hidup*.
- Kurniadi, D. A. (2012). *Pelaksanaan Program Evaluasi Diri Sekolah (ESD) di SMP Negeri 2 Tempel*. 8–30. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/9705>
- PerPres. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*. <https://tppkk-pusat.org/wp-content/uploads/2017/11/Perpres-Nomor-99-Tahun-2017.pdf>
- Reguning, N. D. (2012). *Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Karyawan di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2010-2011*. 11–35.
- Sari, D. M. (2017). Program studi pendidikan ekonomi fakultas ekonomi universitas negeri yogyakarta 2017. In *Junal of Education Development*.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Sulistyastuti. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Analisisnya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Totok Mardikanto, P. S. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.